

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Kecamatan Kaliorang.

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik.

Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa

mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*.

Istilah *e-Government* mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya. *e-Government* itu sendiri dalam institusi publik mulai di perkenalkan menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an, terutama di negara-negara industry maju (OECD).

Di Indonesia inisiatif kearah *e-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI NO. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri.

Semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, contohnya sudah banyak daerah yang telah memiliki website resmi dengan akhiran go.id. Meskipun pada dasarnya *e-Government* bukanlah hanya menampilkan system pemerintahan melalui online. Selain itu banyak juga aplikasi-aplikasi *e-Government* lainnya yang sudah diterapkan di Indonesia seperti MANTRA (MANajemen integrasi dan perTukaRAn data), siMAYA (Administrasi Perkantoran MAYA), PNSMail (Pegawai Negeri Sipil Mail), PNSBox (Private Network Security Box) dan masih banyak lagi. (kominfo.go.id di akses tanggal 22 Oktober 2014 pukul 21.54)

Bahkan Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengadakan kegiatan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dan memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif serta melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. pemeringkatan itu di evaluasi secara periodik berdasarkan jenis lembaga. (pegi.layanan.go.id di akses pada tanggal 22 oktober 2014 pukul 22.12).

Menurut data PeGI tingkat provinsi pada Tahun 2013, sebanyak 11 Provinsi di Indonesia sudah bisa di kategorikan baik dalam menerapkan *e-Government*. (pegi.layanan.go.id di akses pada tanggal 22 oktober 2014 pukul 22.35). Tetapi dari kesebelas provinsi yang dikategorikan baik, Provinsi Kalimantan Timur belum termasuk didalamnya. Menurut Hasil Penelitian pemeringkatan *e-Government* di Kabupaten Kutai Timur, hal ini disebabkan

karena sebagian besar SKPD di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki struktur organisasi akan tetapi Sebagian besar SKPD belum memiliki *Master Plan* yang jelas untuk implementasi e-Gov karena Master Plan dikelola BAPPEDA dan SKPD tidak dilibatkan secara langsung untuk perencanaan *Master Plan* TIK sehingga arah implementasi e- Gov menjadi tidak jelas. Begitupun juga dengan implementasi e-Gov di Kabupaten Kutai Timur pada 18 SKPD terdapat 1 SKPD “Sangat Baik”, 7 SKPD kategori Baik”, 7 SKPD kategori “Kurang” dan 3 SKPD kategori “Sangat Kurang”.

Sehubungan dengan hal tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang belum lama ini dilantik mencanangkan program *Smart City* yang bertujuan mendorong pemaksimalan Informasi Teknologi untuk mewujudkan *good governance*.

Dalam program *Smart City* tersebut terdapat lima layanan aplikasi, pertama adalah *e-Office*, yakni layanan aplikasi yang memudahkan tatakelola korespondensi pemerintahan secara digital. Kedua, e-government kecamatan layanan yang mempermudah pengelolaan administrasi data kependudukan. Ketiga adalah layanan kesehatan terpadu e-Puskesmas. Keempat, Kabupaten Kutai Timur inilah media bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan ke pemerintah untuk ditindak lanjuti secara langsung. Terakhir, Kuciniki (Saya Melihat Anda), yang merupakan aplikasi berbasis lokasi untuk memonitor kinerja staf pemerintahan. untuk segera disolusikan.

Layanan *e-Office* telah digunakan oleh 137 pengguna di seluruh SKPD Makassar. Dengan menggunakan layanan tersebut, penggunaan kertas bisa dipangkas, risiko pemalsuan surat diperkecil, dan semua historis dan log surat

dapat terekam dengan baik. Sementara itu, e-government kecamatan sudah berjalan di **11** Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. E-Puskesmas sudah berjalan di **10** Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Melalui layanan ini pasien dapat melakukan registrasi online menggunakan NIK (Nomor Identitas Kependudukan) sebelum datang ke Puskesmas tertentu. Layanan ePuskesmas juga membuat Dinas Kesehatan semakin termudahkan dalam memonitor data kesehatan masyarakat.

Dari semua layanan aplikasi yang ada dalam program Kabupaten Kutai Timur *Smart City*, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan salah satu Kecamatan yang telah menjalankan layanan e-government kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mewujudkan program Kabupaten Kutai Timur yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas implementasi e-Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Government Di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan efektivitas implementasi e-Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur .
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-

Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas penerapan e-Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan e-Government Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.

3. Teknis

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas penerapan e-government Kecamatan.

